Prosiding Konferensi Nasional Mahasiswa Sejarah Peradaban Islam (KONMASPI)
Volume 3, Oktober 2026
The article is published with Open Access at: https://proceedings.uinsa.ac.id/index.php/konmaspi

Kontinuitas dan Perubahan Ruang Sosial-Keagamaan: Masjid Surapringga ke Masjid Kemayoran Surabaya

Fitri Savira
UIN Sunan Ampel Surabaya
ftrsavira@gmail.com
Muzaiyana
UIN Sunan Ampel Surabaya
muzaiyana@uinsa.ac.id

Abstrak: Masjid bukan hanya tempat untuk beribadah, tetapi juga menjadi tempat penting dalam kehidupan sosial dan keagamaan masyarakat. Masjid Kemayoran merupakan salah satu bangunan yang menjadi bagian sejarah pertumbuhan agama Islam di Kota Surabaya. Keberadaannya terkait dengan Masjid Surapringga yang dulunya berada di area Alun-Alun Surabaya, lalu dipindahkan saat pemerintah kolonial Belanda berkuasa. Masjid Surapringga dipindahkan karena pemerintah Belanda ingin memperluas wilayah serta membangun gedung pengadilan tinggi (*Raad van Justitie*). Peristiwa tersebut tidak hanya menunjukkan perubahan bentuk kota, tetapi juga menunjukkan hubungan antara kebijakan pemerintah kolonial, keberadaan masyarakat beragama Islam, serta peran masjid sebagai pusat kehidupan masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejarah perpindahan dari Masjid Surapringga ke Masjid Kemayoran, serta menganalisis peran masjid sebagai fungsi sosial dan keagamaan dalam kehidupan masyarakat Muslim. Penelitian ini menggunakan metode sejarah yang mencakup heuristik, kritik sumber, interpretasi, dan historiografi. Sumber yang digunakan mencakup prasasti dari Masjid Kemayoran, berbagai dokumen tertulis, arsip, surat kabar yang diterbitkan pada masa itu, serta penelitian sebelumnya yang membahas sejarah Kota Surabaya dan perkembangan masjid di wilayah tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa adanya Masjid Kemayoran tidak terlepas dari perubahan tata ruang Kota Surabaya pada masa kolonial. Setelah dibangun di lokasi baru, masjid tidak hanya digunakan sebagai tempat beribadah, tetapi juga berkembang menjadi ruang untuk berinteraksi sosial, melakukan kegiatan pendidikan, mengelola wakaf, serta berbagai aktivitas yang dilakukan masyarakat. Perkembangan ini menunjukkan kemampuan masyarakat Muslim Surabaya dalam menjaga serta mengembangkan peran masjid di tengah perubahan sosial dan politik. Dengan demikian, sejarah Masjid Kemayoran menunjukkan bahwa masjid memiliki peran penting dalam perkembangan peradaban Islam di Surabaya pada abad ke-19, baik sebagai tempat beribadah maupun sebagai bagian dari kehidupan sosial masyarakat.

Kata Kunci: *Masjid Kemayoran, Masjid Surapringga, Surabaya, Perubahan, Sosial-Keagamaan*

PENDAHULUAN

Dalam sejarah, masjid tidak hanya berfungsi sebagai bangunan ibadah. Di Eropa, Asia Barat, maupun Asia Tenggara, masjid menjadi unsur penting dalam kehidupan sosial-keagamaan umat. Di Indonesia, termasuk di Surabaya, masih dapat dijumpai masjid yang usianya mencapai ratusan tahun, dan keberadaannya menjadi bukti kuat penyebaran Islam di kota ini. Seiring waktu, fungsi masjid meluas dari tempat salat menjadi tempat umat Islam menunaikan tanggung jawab bersama untuk membangun umat (Arisandy & Husain, 2023).

Surabaya pada abad ke-19 juga bukan kota biasa. Sebagai pelabuhan dan pusat perdagangan di pesisir utara Jawa, kota ini tumbuh pesat dan menjelang 1900 telah lebih besar daripada Batavia (Dick, 2002). Pertumbuhan itu disertai penataan ruang kota oleh pemerintah kolonial sesuai kepentingan administrasi dan ekonominya (Handinoto, 2015). Penataan semacam itu menyentuh pusat kota, yakni alun-alun, tempat lambang kekuasaan dan lambang keagamaan lazimnya berdekatan.

Letak masjid dalam sebuah kota memiliki makna. Dalam tata kota tradisional Jawa, masjid lazimnya berada di sisi barat alun-alun (Arisandy & Husain, 2023). Alun-alun sendiri adalah ruang terbuka di pusat kota yang sejak masa Majapahit dan Mataram Islam menjadi tempat bertemunya penguasa dan rakyat, lalu dilanjutkan oleh pemerintah Hindia Belanda untuk mengontrol penguasa daerah (Ashadi, 2017). Pada masa kolonial, alun-alun Surabaya berada di kawasan yang kini dikenal sebagai kompleks Tugu Pahlawan, bukan di depan Gedung Balai Pemuda seperti yang dikenal masyarakat sekarang (Ismail & Sulistyo, 2024). Di sisi barat alun-alun itulah dahulu berdiri Masjid Surapringga.

Pada abad ke-19, pemerintah kolonial berencana mendirikan gedung *Raad van Justitie* di kawasan alun-alun. Masjid Surapringga dianggap kurang tepat berada di tengah pusat kegiatan pemerintahan, sehingga diperintahkan untuk pindah (Arisandy & Husain, 2023). Umat Islam menolak, perselisihan berubah menjadi perlawanan, dan pada akhirnya pemerintah kolonial memberikan tanah pengganti di Westerbuitenweg, yang kini bernama Jalan Indrapura. Di atas tanah itulah berdiri Masjid Kemayoran (Arisandy & Husain, 2023). Kisah ini memperlihatkan bahwa sebuah masjid dapat menjadi titik temu antara perencanaan kota kolonial, kehidupan beragama umat Islam, dan upaya mempertahankan ruang bersama.

Masjid Kemayoran sudah beberapa kali menjadi objek penelitian. Arisandy dan Husain (2023) menelaah peran jamaah dalam perbaikan bangunan dan pengelolaan tanah wakaf pada 1950-an sampai 1990-an. Syafitri dkk. (2024) menulis perkembangan Yayasan Ta'mirul Masjid Kemayoran pada 1976 sampai 2020. Ismail dan Sulistyo (2024) membahas kompleks Tugu Pahlawan sebagai alun-alun Surabaya pada masa kolonial. Penelitian-penelitian tersebut lebih banyak berfokus pada abad ke-20 atau pada tata ruang alun-alun. Sepengetahuan penulis, belum banyak kajian yang menempatkan peristiwa perpindahan masjid pada abad ke-19 sebagai titik awal untuk membaca bagaimana ruang sosial-keagamaan Muslim Surabaya bertahan dan berubah. Artikel ini berupaya mengisi celah tersebut.

Berdasarkan uraian di atas, artikel ini menjawab dua pertanyaan. Pertama, bagaimana sejarah perpindahan Masjid Surapringga ke Masjid Kemayoran pada abad ke-19? Kedua, bagaimana peran Masjid Kemayoran sebagai ruang sosial-keagamaan bagi Muslim Surabaya setelah perpindahan itu, serta apa yang bertahan dan apa yang berubah? Tujuan artikel ini adalah menjelaskan perpindahan tersebut dan menganalisis peran sosial-keagamaan masjid. Hasilnya diharapkan menambah pemahaman tentang sejarah masjid kota di Jawa dan tentang cara umat Islam menyikapi kebijakan kolonial.

Penelitian ini memakai metode sejarah yang terdiri atas empat tahap (Kuntowijoyo, 2003). Tahap pertama adalah heuristik, yaitu mengumpulkan sumber. Tahap kedua adalah kritik sumber, yaitu menguji keaslian dan kelayakan sumber. Tahap ketiga adalah interpretasi, yaitu menafsirkan fakta yang terkumpul. Tahap terakhir adalah historiografi, yaitu menuliskan hasilnya. Sumber primer yang dipakai meliputi prasasti kuningan beraksara Jawa di Masjid Kemayoran, surat kabar sezaman (*Soerabaijasch Handelsblad* dan *De Indische Courant*), dokumen arsip Yayasan Ta'mirul Masjid Kemayoran, serta peraturan perundang-undangan. Prasasti dan surat kabar dibaca melalui transkripsi dan kutipan dalam penelitian terdahulu (Rohma & Asholiha, 2022; Arisandy & Husain, 2023; Begandring Soerabaia, t.t.), sehingga setiap kutipan ditandai dengan keterangan "dalam". Sumber sekunder berupa buku dan artikel jurnal tentang sejarah Surabaya, tata ruang kota Jawa, dan Masjid Kemayoran. Dalam kritik sumber, penulis membandingkan angka tahun dan cerita dari berbagai sumber, dan memperlakukan cerita lisan serta tulisan populer secara hati-hati. Fokus waktu artikel ini adalah abad ke-19, sedangkan peristiwa abad ke-20 dipakai untuk melihat jejak kelanjutannya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Alun-alun Surabaya dan kedudukan Masjid Surapringga

Untuk memahami mengapa perpindahan masjid menimbulkan polemik, kita perlu mengetahui lebih dahulu di mana Masjid Surapringga berdiri. Alun-alun tradisional di Jawa umumnya dilengkapi keraton, masjid, pasar, dan pagar keliling (Basundoro, 2012). Pada masa kolonial, pemerintah mengatur sendiri tata letaknya dan menambahkan bangunan pemerintahan seperti kantor asisten residen, kantor bupati, pengadilan, penjara, sekolah, dan tempat ibadah (Nur Erine dkk., 2022).

Alun-alun Surabaya mengikuti pola itu. Di sisi utara terdapat taman kota (*stadstuin*) dan kantor bupati yang kemudian menjadi *Hoogere Burger School*. Di sisi timur berdiri kantor gubernur (*Gouverneurs Kantoor*), di sisi selatan gedung *Raad van Justitie*, dan di sisi barat Masjid Surapringga atau Kemayoran (Ismail & Sulistyo, 2024). Perlu dicatat bahwa gambaran ini adalah potret akhir masa kolonial, karena bangunan-bangunan itu tidak didirikan pada waktu yang sama. Kantor gubernur misalnya, dibangun pada 1929 dan selesai dua tahun kemudian (Prameswari dkk., 2017) jauh setelah peristiwa pembongkaran masjid.

Mengenai Masjid Surapringga, Tim Penulis Masjid Kemayoran (Arisandy & Husain, 2023) menyebut masjid ini dibangun umat Islam sebelum 1772. Penelitian lain menyebut pembangunannya pada 1772 (Qisam dkk., 2020). Letaknya di sisi barat alun-alun sesuai dengan pola tata kota tradisional Jawa (Arisandy & Husain, 2023). Dengan demikian, Masjid Surapringga bukan bangunan pinggiran, melainkan salah satu penanda pusat kota yang bersanding dengan lambang kekuasaan pemerintah.

Pembongkaran Masjid Surapringga dan perlawanan jamaah

Masalah muncul ketika pemerintah kolonial hendak mendirikan *Raad van Justitie*, yaitu lembaga peradilan tinggi yang mengadili perkara perdata dan pidana bagi berbagai golongan penduduk (Ismail & Sulistyo, 2024). Lokasi di alun-alun dipilih karena strategis dan berhadapan langsung dengan gedung pemerintah Hindia Belanda (Arisandy & Husain, 2023). Pada saat yang sama, keberadaan masjid dinilai kurang tepat karena berada di tengah kegiatan pemerintahan (Arisandy & Husain, 2023). Atas dasar itu pemerintah memerintahkan agar masjid dipindahkan.

Perintah itu tidak diterima oleh jamaah. Bagi umat Islam, masjid adalah bangunan sakral, sehingga rencana penggusuran menimbulkan perselisihan (Arisandy & Husain,

2023). Pemerintah tetap berusaha membongkar masjid dengan paksa. Para ulama dan jamaah melawan melalui pertempuran lokal yang dipimpin Kyai Badrun. Kyai Badrun gugur tertembak, lalu dimakamkan di sekitar Jalan Tembaan dan dikenal sebagai Kyai Sedo Masjid (Arisandy & Husain, 2023). Masyarakat juga mengaitkan nama Tembaan dengan tempat tertembaknya sang kyai (Ismail & Sulistyo, 2024). Bagi jamaah, peristiwa tersebut dimaknai sebagai jihad untuk mempertahankan masjid sebagai rumah Allah. Namun, dengan kekuatan militer yang lebih besar, perlawanan itu dapat dipatahkan (Wiryoprawiro, 1986).

Peristiwa ini menunjukkan bahwa perpindahan masjid bukan sekadar urusan teknis tata kota. Menurut penulis, di sini berbenturan dua cara pandang. Pemerintah kolonial menginginkan pusat kota yang tertib, dengan lambang-lambang kekuasaannya saling berhadapan. Sebaliknya, jamaah memandang masjid sebagai ruang sakral milik umat yang tidak dapat dipindahkan begitu saja. Sumber yang tersedia belum menyebut tahun pasti pembongkaran dan hanya menempatkannya pada abad ke-19 (Nugroho dkk., 2019). Lembaga yang menjadi alasan pembongkaran itu pun kemudian hadir sebagai gedung peradilan tinggi kolonial di Surabaya, yang gambarnya tersimpan dalam koleksi KITLV (Gambar 1).



Gambar 1. *Paleis van Justitie* (gedung peradilan tinggi kolonial) di Surabaya, 1924
Sumber: KITLV, album *Herinnering aan Soerabaja* (KITLV A19), Leiden University Libraries, https://digitalcollections.universiteitleiden.nl/view/item/725778.

Tanah pengganti dan berdirinya Masjid Kemayoran

Setelah perlawanan padam, pemerintah mengumpulkan ulama dan jamaah yang tersisa lalu memberikan kompensasi. Bentuknya adalah sebidang tanah beserta bangunan di Westerbuitenweg, kini Jalan Indrapura, yang sebelumnya merupakan rumah seorang mayor tentara Hindia Belanda dengan luas sekitar dua hektare. Pemberian ini diperkuat

prasasti kuningan yang diserahkan kepada Raden Tumenggung Kromojoyo Dirono, kemudian disahkan melalui serah terima kepada jamaah (Arisandy & Husain, 2023). Nama Kemayoran berasal dari bekas rumah sang mayor tersebut (Arisandy & Husain, 2023).

Para peneliti memaknai pemberian tanah ini dengan sedikit berbeda. Arisandy dan Husain (2023) menyebut kompensasi diberikan agar perlawanan umat Islam berhenti, sedangkan Syafitri dkk. (2024) menyebutnya sebagai upaya menarik simpati warga Muslim. Dua tafsir ini dapat dipandang saling melengkapi, yakni kompensasi berfungsi meredam konflik sekaligus meraih dukungan umat.

Setelah tanah diterima, ulama dan jamaah membentuk panitia untuk mengubah bangunan dan tapak tersebut menjadi kompleks masjid. Masjid dibangun pada 1844 sampai 1848 dengan perencana J. W. B. Wardenaar, yang pada waktu itu disebut sebagai satu-satunya arsitek di Surabaya. Bangunannya bergaya arsitektur Jawa, dengan bangunan utama untuk ibadah dan dua menara segi delapan setinggi sekitar 70 kaki di sisi selatan dan utara. Beberapa tahun setelah peresmian, menara selatan runtuh karena tersambar petir dan tidak dibangun kembali, sehingga kini hanya satu menara yang tersisa (Faber, 1931).

Penentuan tahun pendirian perlu dilakukan dengan hati-hati karena sumber tidak seragam. Syafitri dkk. (2024) mengaitkan pemberian tanah dengan masa Bupati Kromojoyo Dirono pada 1772 sampai 1776 dan menyebut masjid dibangun sekitar 1750-an, sedangkan sebuah tulisan populer menyebut Masjid Kemayoran berdiri pada 1932 (detikJatim, t.t.). Angka-angka tersebut sulit diselaraskan dengan rentang 1844 sampai 1848. Rentang ini didukung oleh catatan tentang arsitek dan oleh berita *Soerabaiasch Handelsblad* tanggal 18 Juli 1934 yang melaporkan renovasi masjid setelah 86 tahun berdiri. Bila dihitung mundur, berita itu menunjuk sekitar 1848 (Ismail & Sulistyo, 2024).

Satu petunjuk tambahan datang dari isi prasasti itu sendiri. Menurut transkripsi yang dimuat Begandring Soerabaia (t.t.), prasasti menyebut tiga pejabat sebagai penanda pembangunan: Gubernur Jenderal Jan Jacob Rochussen, Residen Surabaya Daniel Francois Willem Pietermaat, dan Bupati Raden Tumenggung Kromojoyo Dirono, serta mencantumkan angka tahun 1772–1776 dan nama perancang bangunan dalam ejaan Jawa yang mirip “War De Nar”, yang tampaknya merujuk pada Wardenaar. Rochussen menjabat gubernur jenderal pada 1845–1851 (Ricklefs, 2008), sehingga angka 1772–1776 tidak mungkin tahun Masehi. Angka itu lebih masuk akal dibaca sebagai tahun

Jawa, yang bila dikonversi jatuh pada sekitar 1844–1848 Masehi. Pembacaan ini sejalan dengan rentang yang dipakai artikel ini, dan menjelaskan mengapa sebagian penulis keliru menempatkan masjid pada 1700-an. Perlu dicatat bahwa konversi tahun Jawa ke Masehi dalam literatur populer berbeda-beda, sehingga penulis memakai rentang 1844 sampai 1848 sebagai acuan sambil mengakui bahwa pemeriksaan langsung terhadap prasasti oleh ahli epigrafi dan arsip masih diperlukan untuk memastikannya.

Perbedaan lain tampak pada keterangan menara: Ismail dan Sulistyo (2024) mengaitkannya dengan Masjid Surapringga, sedangkan Arisandy dan Husain (2023) mengaitkannya dengan bangunan Kemayoran berdasarkan Faber (1931). Artikel ini mengikuti yang terakhir karena rujukannya lebih jelas.

Rupa masjid pada dekade-dekade awal dapat dilihat dari foto-foto KITLV. Foto K. Buwalda bertarikh 1865 berjudul *Moskee te Soerabaja* (Gambar 2) dibuat hanya sekitar dua dekade setelah masjid selesai dibangun, dan menjadi bukti visual bahwa masjid kota itu sudah mapan pada pertengahan abad ke-19.



Gambar 2. Masjid di Surabaya, sekitar 1865 (judul asli: *Moskee te Soerabaja*)
Sumber: K. Buwalda, 1865, KITLV 155217 (album KITLV A1106), Leiden University Libraries, http://hdl.handle.net/1887.1/item:892612.

Masjid Kemayoran sebagai ruang ibadah, pendidikan, dan sosial

Di lokasi baru, Masjid Kemayoran berkembang menjadi lebih dari tempat salat. Perlu dijelaskan bahwa keterangan rinci tentang kegiatan sehari-hari pada abad ke-19 sangat terbatas. Bahkan data kegiatan masjid pada 1976 sampai 1978 pun tidak dimiliki pengurus sekarang (Syafitri dkk., 2024). Informasi yang paling lengkap berasal dari abad ke-20 dan awal abad ke-21. Karena itu, bagian ini dibaca sebagai gambaran

perkembangan peran masjid yang berakar pada peristiwa abad ke-19, bukan sebagai potret kegiatan masjid pada tahun 1800-an.

Dalam bidang keagamaan, masjid menyelenggarakan kajian kitab dan tafsir, pengajian rutin untuk anak, remaja, bapak, dan ibu, pembacaan Yasin dan tahlil, salawat, peringatan maulid, serta peringatan hari besar Islam. Pengajian ibu-ibu bernama Jam'iyah Wanita berlangsung setiap hari Ahad sesudah Asar (Syafitri dkk., 2024). Satu kegiatan menarik adalah haul Kyai Sedo Masjid. Dengan haul itu, jamaah terus mengenang tokoh yang gugur dalam peristiwa pembongkaran masjid, sehingga ingatan tentang peristiwa abad ke-19 tetap hidup dalam praktik keagamaan masa kini.

Dalam bidang pendidikan, Yayasan Ta'mirul Masjid Kemayoran mendirikan Taman Pendidikan Ta'miriyah di Jalan Indrapura yang mengelola jenjang TK, SD, SMP, dan SMA. Nama Ta'miriyah berasal dari pengurus takmir masjid (Syafitri dkk., 2024). Masjid juga menjadi tempat anak belajar di TPQ (Syafitri dkk., 2024). Dalam bidang sosial, yayasan atas nama masjid menyalurkan zakat fitrah dan zakat mal, memberi santunan anak yatim, menyediakan layanan ambulans dan perawatan jenazah, melayani konsultasi pranikah dan akad nikah, membantu korban bencana, serta menyaksikan ikrar syahadat bagi mualaf (Syafitri dkk., 2024).

Tanah wakaf sebagai penopang ruang sosial masjid

Tanah luas yang diterima dari pemerintah kolonial dikelola jamaah dengan menyewakannya kepada warga untuk rumah tinggal maupun usaha, dan hasilnya dipakai untuk kebutuhan serta perbaikan masjid (Arisandy & Husain, 2023). Tanah wakaf masjid tersebar di sejumlah kampung di sekitarnya, seperti Kemayoran, Grogol, Jagalan, Lawang Seketeng, Pandean, dan Indrapura (Arisandy & Husain, 2023). Berdasarkan arsip masjid, jumlah rumah yang berdiri di atas tanah itu tampak pada Tabel 1.

Tabel 1. *Jumlah rumah yang berdiri di atas tanah Masjid Kemayoran Surabaya*

No.	Alamat	Jumlah rumah
1	Jagalan Gang I	15
2	Grogol	20
3	Grogol Kauman Gang I	16
4	Grogol Kauman Gang II	33
5	Grogol Kauman Gang III	28
6	Pandean Gang V	1
7	Grogol Kalimir	8
8	Lawang Seketeng Gang V	29
9	Kemayoran Gang Buntu	10

No.	Alamat	Jumlah rumah
10	Kemayoran Gang Masjid	5
11	Kemayoran Kauman	9
12	Indrapura	7
	Jumlah	**181**

Sumber: Arisandy & Husain (2023), diolah dari arsip Masjid Kemayoran; baris jumlah merupakan hasil penjumlahan penulis.

Penyewa hanya memiliki hak atas bangunan, sedangkan tanahnya tetap milik masjid. Untuk memperbaiki rumah, menggadaikannya, atau menjualnya, mereka harus mendapat izin pengurus masjid dan memberikan sumbangan sukarela (Arisandy & Husain, 2023). Pengelolaan ini memperlihatkan bahwa masjid berperan sebagai lembaga sosial-ekonomi yang menaungi kehidupan banyak keluarga di sekitarnya. Dengan 181 rumah yang tersebar di dua belas lokasi, jaringan sewa ini juga menunjukkan betapa luas jangkauan ruang sosial masjid di luar bangunan ibadahnya.

Di sisi lain, kompensasi kolonial itu menyisakan kerentanan hukum. Pemberian tanah tidak disertai dokumen hitam di atas putih, dan satu-satunya bukti adalah prasasti (Arisandy & Husain, 2023). Akibatnya, status tanah beberapa kali dipersoalkan. Pemerintah kotapraja mengklaim tanah itu berdasarkan penyelidikan Residen Pauwel pada 1939, dan hingga 1958 pihak masjid belum memperoleh pengesahan (Arisandy & Husain, 2023). Persetujuan hak atas tanah pada 1963 gugur karena persyaratannya tidak dipenuhi tepat waktu, dan baru pada 1995 terbit sertifikat hak pakai atas tanah Taman Pendidikan Ta'miriyah seluas 5.172 m² (Arisandy & Husain, 2023). Pada 1970-an, kabar tentang landreform membuat sebagian penyewa enggan membayar sumbangan (Arisandy & Husain, 2023). Dari sini tampak bahwa dampak kebijakan kolonial dirasakan jamaah sampai satu abad kemudian.

Kontinuitas dan Perubahan

Dari kronologi itu, ada beberapa hal yang bertahan. Pertama, masjid tetap menjadi pusat komunitas Muslim Surabaya. Masjid Kemayoran termasuk masjid utama di kota ini hingga 1970-an (Arisandy & Husain, 2023). Kedua, jamaah tetap menjadi penggerak utama. Pada perluasan 1934, pekerjaan dilakukan tanpa upah, hampir seluruh bahan bangunan diperoleh gratis, dan biaya sekitar 20.000 sebagian ditanggung jamaah (Arisandy & Husain, 2023). Pada 1970-an, pengurus menyebut sekitar 97 persen biaya pembangunan masjid sebelumnya berasal dari rakyat (Arisandy & Husain, 2023). Ketiga,

ingatan tentang peristiwa pembongkaran dirawat melalui haul Kyai Sedo Masjid. Keempat, masjid terus berfungsi sebagai pengelola harta umat melalui tanah wakaf.

Pada saat yang sama, banyak hal yang berubah. Dari segi ruang, masjid berpindah dari sisi barat alun-alun di pusat kota ke bekas rumah seorang mayor di Jalan Indrapura. Dari segi bentuk bangunan, atap tajug tumpang tiga diganti kubah, dan perluasan 1964 sampai 1969 mengubah arah hadap serta membuat bangunan tidak lagi bernuansa Hindu-Jawa, melainkan banyak dipengaruhi seni Islam-Arab (Arisandy & Husain, 2023). Dari segi kelembagaan, kepengurusan takmir pada 1930-an berkembang menjadi yayasan pada 1976 (Syafitri dkk., 2024). Dari segi fungsi, masjid menambah peran pendidikan formal dan layanan sosial yang luas. Hubungan dengan negara pun bergeser. Jika semula berbenturan dengan pemerintah kolonial, kini pengelola bekerja sama dengan pemerintah dan instansi seperti Polda Jawa Timur dalam kegiatan sosial (Syafitri dkk., 2024). Ringkasan perbandingan tersebut tampak pada Tabel 2.

Tabel 2. *Ringkasan kontinuitas dan perubahan ruang sosial-keagamaan Masjid Kemayoran*

Aspek	**Yang bertahan**	**Yang berubah**
Ruang	Masjid tetap menjadi pusat komunitas Muslim kota	Dari sisi barat alun-alun ke Jalan Indrapura (bekas rumah mayor)
Bangunan	Fungsi utama sebagai tempat ibadah	Atap tajug diganti kubah; satu menara runtuh; arah hadap dan corak berubah
Penggerak	Jamaah sebagai penyokong utama tenaga dan dana	Dari swadaya langsung ke pengelolaan lewat yayasan
Kelembagaan	Pengurus takmir sebagai pengelola	Takmir 1930-an menjadi yayasan pada 1976
Fungsi	Ibadah, pengajian, dan pengelolaan wakaf	Bertambah pendidikan formal (Ta'miriyah) dan layanan sosial
Ingatan	Haul Kyai Sedo Masjid merawat kenangan peristiwa abad ke-19	Dari memori perlawanan menjadi tradisi keagamaan
Hubungan dengan negara	Tanah wakaf tetap bersumber dari kompensasi kolonial	Dari benturan dengan pemerintah kolonial ke kerja sama dengan pemerintah

Sumber: diolah penulis dari Arisandy & Husain (2023) dan Syafitri dkk. (2024).

Dengan kerangka kontinuitas dan perubahan, perpindahan 1844 sampai 1848 tampak sebagai titik balik, bukan akhir riwayat Masjid Surapringga. Umat Islam kehilangan lokasi di pusat kota, tetapi memperoleh lahan yang luas. Lahan itu dikelola secara swadaya hingga menopang ibadah, pendidikan, dan kegiatan sosial. Hal ini menunjukkan kemampuan masyarakat Muslim Surabaya menjaga dan mengembangkan peran masjid di tengah perubahan sosial dan politik. Tentu saja, kesimpulan ini bertumpu

pada sumber yang sebagian besar berasal dari abad ke-20, sehingga kajian arsip abad ke-19 masih dibutuhkan untuk menguatkannya.

KESIMPULAN

Perpindahan Masjid Surapringga ke Masjid Kemayoran terjadi pada abad ke-19 akibat rencana pemerintah kolonial membangun *Raad van Justitie* di kawasan alun-alun. Penolakan jamaah berujung pada perlawanan yang menewaskan Kyai Badrun, lalu pemerintah memberi tanah pengganti bekas rumah seorang mayor di Westerbuitenweg, yang kini menjadi Jalan Indrapura. Masjid baru dibangun di tanah itu sekitar 1844 sampai 1848, rentang yang diperkuat oleh pembacaan angka tahun pada prasasti sebagai tahun Jawa dan oleh keterlibatan Gubernur Jenderal Rochussen. Peristiwa ini menunjukkan benturan antara penataan ruang kota kolonial dan pandangan umat Islam tentang masjid sebagai ruang sakral.

Di lokasi baru, Masjid Kemayoran berkembang menjadi ruang ibadah, pendidikan, kegiatan sosial, dan pengelolaan wakaf. Peran jamaah, fungsi masjid sebagai pusat komunitas, dan ingatan atas peristiwa pembongkaran bertahan, sedangkan lokasi, bentuk bangunan, kelembagaan, dan hubungan dengan negara berubah. Dengan demikian, perpindahan masjid pada abad ke-19 menjadi titik balik yang membuka jalan bagi peran masjid sebagai pusat kehidupan sosial-keagamaan Muslim Surabaya hingga kini.

Artikel ini memiliki keterbatasan karena rincian kegiatan masjid pada abad ke-19 masih minim dan sebagian besar sumber berasal dari abad ke-20. Penelitian lanjutan perlu memeriksa langsung prasasti, arsip kolonial, dan surat kabar sezaman, misalnya melalui koleksi Delpher, serta mencocokkan foto-foto koleksi KITLV dengan ciri bangunan, untuk memastikan tahun peristiwa dan menggali kegiatan masjid pada abad ke-19.

DAFTAR PUSTAKA

Arisandy, Y. P., & Husain, S. B. (2023). Peran jamaah Masjid Kemayoran Surabaya dalam peningkatan infrastruktur dan pengelolaan tanah wakaf, 1950an–1990an. *Jurnal Sejarah Indonesia*, *6*(2), 180–192. https://doi.org/10.62924/jsi.v6i2.32608

Basundoro, P. (2012). *Dua kota tiga zaman: Surabaya dan Malang sejak kolonial sampai kemerdekaan*. Yogyakarta: Ombak.

Begandring Soerabaia. (t.t.). *Alun-alun Surabaya, Masjid Kemayoran, dan Jan Jacob Rochussen*. https://begandring.com/alun-alun-surabaya-masjid-kemayoran-dan-jan-jacob-rochussen/ (diakses 19 Oktober 2026).

Buwalda, K. (1865). *Moskee te Soerabaja* [Foto]. KITLV 155217, album KITLV A1106. Leiden University Libraries, Digital Collections. http://hdl.handle.net/1887.1/item:892612

detikJatim. (t.t.). *Sejarah Masjid Kemayoran Surabaya hadiah dari pemerintah Hindia Belanda*. https://www.detik.com/jatim/budaya/d-5908822/sejarah-masjid-kemayoran-surabaya-hadiah-dari-pemerintah-hindia-belanda

Dick, H. W. (2002). *Surabaya, city of work: A socioeconomic history, 1900–2000*. Athens: Ohio University Press.

Handinoto. (2015). *Perkembangan kota di Jawa abad XVIII sampai pertengahan abad XX dipandang dari sudut bentuk dan struktur kotanya*. Yogyakarta: Ombak.

Ismail, A. S., & Sulistyo, W. D. (2024). Komplek Tugu Pahlawan sebagai alun-alun Surabaya pada masa kolonial Hindia Belanda dan nilai-nilai edukasinya. *Jurnal Pendidikan Sejarah Indonesia, 7*. https://journal2.um.ac.id/index.php/sejarah/article/view/48301

KITLV. (1924). *Paleis van Justitie te Soerabaja* [Foto], dalam album *Herinnering aan Soerabaja* (KITLV A19). Leiden University Libraries, Digital Collections. https://digitalcollections.universiteitleiden.nl/view/item/725778

Kuntowijoyo. (2003). *Metodologi sejarah* (Edisi ke-2). Yogyakarta: Tiara Wacana.

Ricklefs, M. C. (2008). *A history of modern Indonesia since c. 1200* (4th ed.). Basingstoke: Palgrave Macmillan.

Rohma, & Asholiha. (2022). [Lengkapi: judul artikel, nama jurnal, volume, halaman].

Salzwedel, H. (1880–1888). *Missigit op de Aloen aloen. Soerabaija* [Foto]. NG-1988-26-13. Rijksmuseum, Amsterdam. https://www.rijksmuseum.nl/en/collection/NG-1988-26-13

Syafitri, A., dkk. (2024). Sejarah perkembangan Yayasan Ta'mirul Masjid Kemayoran Surabaya tahun 1976–2020. *Qurthuba: Jurnal Sejarah Peradaban Islam, 7*(2). https://jurnalfahum.uinsa.ac.id/index.php/qurthuba/article/download/610/532/4334